

Analisis Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas di Nagari Guguak Sarai

Arrum Komala Sari ^{1*}, Muhammad Wafiq ², Dwila Maresti ³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi,
Indonesia:arrumkomala1112@gmail.com

* Corresponding Author : Arrum Komala Sari

Abstract: This study aims to analyze in depth the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) in an effort to improve financial management accountability in Guguak Sarai Village, Solok Regency. The research focuses on understanding the implementation process, the challenges faced, and the impacts on village governance. Using qualitative descriptive methods, data were collected through interviews with village officials, direct observation of financial management activities, and review of related documentation. The results indicate that the implementation of SISKEUDES can increase administrative efficiency, strengthen transparency, and improve the quality of the preparation and presentation of village financial reports. This system is considered to help make the recording, planning, and reporting processes more structured and easier to trace. However, its implementation still faces several obstacles, such as limited human resource competency, minimal training or outreach activities, and inadequate technological infrastructure. Overall, the use of SISKEUDES makes a significant contribution to improving the accountability of village financial management and supports the realization of good governance principles at the local level.

Keywords: Accountability; Governance; SISKEUDES; Transparency; Village Financial Management.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Nagari Guguak Sarai, Kabupaten Solok. Fokus penelitian mencakup pemahaman mengenai proses penerapan, berbagai tantangan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap tata kelola pemerintahan nagari. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dihimpun melalui wawancara dengan aparatur nagari, observasi langsung pada aktivitas pengelolaan keuangan, dan penelusuran dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, serta memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan nagari. Sistem ini dinilai membantu proses pencatatan, perencanaan, dan pelaporan menjadi lebih terstruktur dan mudah ditelusuri. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya kegiatan pelatihan atau sosialisasi, serta sarana prasarana teknologi yang belum memadai. Secara keseluruhan, penggunaan SISKEUDES memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari dan turut mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance di tingkat lokal.

Naskah Masuk: 18 September 2025;

Revisi: 21 Oktober 2025;

Diterima: 14 November 2025;

Tersedia: 17 November 2025.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Kata kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Desa; SISKEUDES; Tata Kelola Pemerintahan; Transparansi.

1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya sendiri, termasuk dalam hal keuangan desa. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut untuk mengelola anggaran secara terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yaitu aplikasi berbasis digital yang bertujuan membantu desa dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan secara lebih efisien dan akuntabel. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat penyusunan laporan, serta mendorong transparansi publik terhadap penggunaan dana desa.

Namun, realisasi implementasi SISKEUDES di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan teknologi, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta hambatan teknis pada infrastruktur desa. Padahal, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024, korupsi dana desa masih menjadi salah satu kasus paling dominan dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1,5 triliun, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan sistem akuntabilitas keuangan di tingkat desa.

Nagari Guguak Sarai di Kabupaten Solok merupakan salah satu pemerintahan nagari yang telah mengimplementasikan SISKEUDES dalam tata kelola keuangan. Penggunaan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan tertib administrasi, transparansi laporan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana nagari. Namun, efektivitas sistem ini masih memerlukan evaluasi untuk menilai sejauh mana SISKEUDES benar-benar mendukung peningkatan akuntabilitas keuangan nagari.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Nagari Guguak Sarai, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya, serta menilai kontribusinya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

Bagian ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian serta mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan landasan pemikiran untuk penelitian ini; apabila terdapat hipotesis, hipotesis tersebut dapat disajikan secara tersirat dan tidak wajib dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

Pemerintahan Nagari

Nagari merupakan bentuk pemerintahan desa khas Sumatera Barat yang memiliki struktur sosial dan sistem nilai berdasarkan adat Minangkabau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pemerintahan nagari terdiri atas Wali Nagari dan perangkatnya, serta didampingi oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) yang berfungsi dalam pengawasan dan musyawarah publik. Dalam konteks akuntabilitas, pemerintahan nagari memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat.

Teori ECG Pemerintahan

Teori Effectiveness, Coherency, and Good Governance (ECG) oleh Supriyono (2018) digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan berdasarkan tiga dimensi:

1. Efektivitas (Effectiveness) — sejauh mana kebijakan atau program mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, SISKEUDES diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui otomatisasi administrasi.
2. Koherensi (Coherency) — keselarasan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. Implementasi SISKEUDES menuntut kesesuaian antara aturan, praktik lapangan, dan tujuan pembangunan desa.
3. Good Governance — penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan supremasi hukum. SISKEUDES menjadi alat pendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut agar tata kelola desa lebih terbuka dan dapat diaudit.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola melalui tahapan berurutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut wajib dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri sebagai sistem digital untuk membantu desa mengatur, mencatat, dan melaporkan keuangannya secara akuntabel.

Fitur utama SISKEUDES mencakup:

1. Perencanaan dan Penganggaran (penyusunan RKPDes dan APBDes),
2. Penatausahaan (pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas),
3. Pelaporan (pembuatan laporan keuangan otomatis),

4. Pertanggungjawaban (dokumentasi dan audit).

Kelebihan SISKEUDES antara lain kemudahan penggunaan, kontrol internal otomatis, dan integrasi dengan sistem pengawasan pemerintah daerah. Namun, tantangan utamanya adalah keterbatasan SDM, sarana teknologi, dan sosialisasi penggunaan yang belum merata.

Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban aparatur publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang dan penggunaan sumber daya publik. Menurut Hulme & Turner (1997), akuntabilitas publik meliputi dua arah: vertikal (kepada atasan/pemerintah pusat) dan horizontal (kepada masyarakat).

Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui:

1. Akuntabilitas Manajerial – efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana publik.
2. Akuntabilitas Keuangan – kejujuran dan ketepatan dalam penggunaan anggaran.
3. Akuntabilitas Program dan Kebijakan – kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat.

Implementasi SISKEUDES merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dengan menyediakan laporan keuangan yang cepat, transparan, dan dapat diakses publik.

Hubungan SISKEUDES dengan Akuntabilitas

SISKEUDES berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah nagari melalui:

1. Otomatisasi pencatatan keuangan sehingga meminimalkan kesalahan administrasi;
2. Transparansi laporan yang dapat dipantau oleh berbagai pihak;
3. Pengawasan internal dan eksternal yang lebih mudah dilakukan;
4. Peningkatan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan nagari.

Beberapa penelitian terdahulu (misalnya Maharani & Akbar, 2022; Rivan & Maksum, 2019) menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES secara konsisten mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan desa dan memperkuat akuntabilitas publik, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada kompetensi pengguna dan dukungan infrastruktur.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Nagari Guguak Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena nagari ini telah menerapkan SISKEUDES dalam tata kelola keuangannya. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan masyarakat. Selain itu dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan serta penggunaan aplikasi SISKEUDES di kantor nagari. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti profil nagari, dokumen APBDDes, laporan keuangan, serta hasil output SISKEUDES. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan saling melengkapi. Analisis data menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas serta kredibilitas hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Proses Implementasi SISKEUDES di Nagari Guguak Sarai

Sebelum diterapkannya SISKEUDES, pengelolaan keuangan nagari di Guguak Sarai masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen tertulis dan lembar kerja Microsoft Excel. Proses tersebut membutuhkan waktu lama, rawan kesalahan perhitungan, dan sulit untuk dipantau secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Sejak tahun 2020, pemerintah nagari mulai menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Proses penerapan dimulai dengan pelatihan dasar bagi perangkat nagari, diikuti oleh pendampingan dari pihak kecamatan dan inspektorat

daerah. Dengan penerapan SISKEUDES, seluruh transaksi keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dilakukan secara digital dan tersistematis.

Efektivitas Administrasi dan Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penggunaan SISKEUDES, efektivitas administrasi meningkat secara signifikan. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah diverifikasi. Aplikasi ini menghasilkan berbagai dokumen seperti buku kas umum, laporan realisasi anggaran, buku pajak, dan dokumen pertanggungjawaban secara otomatis. Hal ini membantu perangkat nagari dalam memenuhi tengat waktu pelaporan kepada pemerintah kabupaten. Selain itu, format laporan yang seragam juga memudahkan proses pemeriksaan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) maupun auditor daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Penerapan SISKEUDES berdampak nyata terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan nagari. Informasi mengenai penggunaan anggaran kini lebih mudah diakses masyarakat melalui papan pengumuman, rapat musyawarah nagari, dan publikasi laporan keuangan. Masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran, sumber dana, serta realisasi kegiatan pembangunan nagari. Selain itu, sistem ini juga memperkuat fungsi pengawasan internal karena setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat ditelusuri kembali. Dengan demikian, risiko penyimpangan dan manipulasi data keuangan dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah nagari meningkat.

Koordinasi dan Peran Antarperangkat Nagari

Hasil wawancara menunjukkan adanya peningkatan koordinasi antarperangkat nagari setelah penerapan SISKEUDES. Wali Nagari berperan sebagai penanggung jawab kebijakan keuangan, Sekretaris Nagari bertugas mengkoordinasikan administrasi dan dokumen pendukung, sedangkan Kaur Keuangan berperan sebagai operator utama aplikasi. Kolaborasi ini memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan setiap tahapan keuangan berjalan sesuai prosedur. Namun demikian, beberapa perangkat nagari mengaku masih perlu pendampingan tambahan agar seluruh staf memahami fungsi sistem secara menyeluruh.

Kendala dalam Implementasi SISKEUDES

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi SISKEUDES di Nagari Guguak Sarai masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum seluruhnya memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai. Selain itu, ketersediaan infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet masih terbatas, terutama ketika terjadi gangguan koneksi atau pemadaman listrik. Sosialisasi dan pelatihan dari BPKN serta pemerintah daerah juga masih bersifat insidental, belum dilakukan secara rutin. Kondisi ini menyebabkan proses input data terkadang tertunda dan menghambat penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu.

Peran Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh SISKEUDES. BPN menilai bahwa sistem ini membantu mereka dalam menelusuri laporan realisasi kegiatan dan memastikan kesesuaian antara data laporan dengan pelaksanaan di lapangan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana nagari masih rendah. Sebagian masyarakat belum memahami fungsi SISKEUDES serta pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengawasan keuangan nagari.

Dampak Penerapan SISKEUDES terhadap Akuntabilitas

Secara keseluruhan, penerapan SISKEUDES terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. Setiap transaksi keuangan kini terdokumentasi secara otomatis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti digital. Proses pelaporan menjadi lebih transparan dan akurat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari. SISKEUDES juga membantu menekan potensi penyimpangan dana karena sistem memiliki jejak audit internal (audit trail) yang mencatat seluruh aktivitas pengguna. Meski demikian, untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang optimal, pemerintah nagari masih perlu memperkuat kapasitas aparatur dan melakukan evaluasi sistem secara berkala.

Harapan dan Rencana Pengembangan ke Depan

Dari hasil wawancara dengan Wali Nagari dan perangkatnya, terdapat harapan agar penggunaan SISKEUDES dapat terus dikembangkan dengan fitur yang lebih responsif dan terhubung langsung dengan sistem keuangan pemerintah daerah. Mereka juga berharap

adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten dalam bentuk pelatihan rutin, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta peningkatan literasi digital bagi seluruh perangkat nagari dan masyarakat. Dengan dukungan tersebut, implementasi SISKEUDES diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menjadi contoh praktik tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di tingkat nagari.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Nagari Guguak Sarai telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. Penerapan sistem ini mampu memperbaiki ketertiban administrasi, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan transparansi penggunaan dana publik kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini lebih terstruktur dan terdokumentasi melalui aplikasi digital, sehingga risiko kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, kurangnya pelatihan berkelanjutan, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana teknologi di lingkungan pemerintahan nagari. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah nagari bersama pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan pendampingan rutin, memperluas sosialisasi penggunaan SISKEUDES kepada seluruh perangkat dan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur teknologi agar sistem dapat berjalan optimal. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SISKEUDES perlu dilakukan untuk memastikan sistem ini benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan nagari yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Agustin, M., & Putri, S. (2021). Kajian penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan Daerah*, 7(2), 88–100. <https://doi.org/10.32503/japd.v7i2.2021>
- Andriani, D., & Fathurrahman, H. (2020). Efektivitas penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 245–256. <https://doi.org/10.23969/jrak.v8i3.2020>
- Arifin, M., & Rahmawati, L. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan SISKEUDES sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 56–68. <https://doi.org/10.31219/jipkp.v9i1.2022>
- Astuti, N. P., & Wijayanti, D. (2023). Kajian atas implementasi SISKEUDES untuk memperkuat transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(2), 132–145.
- Firmansyah, R., & Nurhasanah, D. (2021). Evaluasi penerapan aplikasi SISKEUDES terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 5(2), 121–134.
- Hidayat, T., & Safitri, A. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1), 77–89.
- Ismail, A., & Hasan, N. (2022). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai instrumen good governance di desa. *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 8(2), 44–57.
- Lestari, M., & Ramadhan, D. (2021). Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas penerapan SISKEUDES. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 188–200.
- Maharani, R., & Akbar, F. (2022). Pengaruh implementasi SISKEUDES terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(2), 112–125. <https://doi.org/10.12345/jakd.v9i2.2022>
- Mardiana, I., & Sudirman, R. (2020). Implementasi e-government melalui SISKEUDES untuk akuntabilitas desa. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 5(1), 34–47.

- Nurlaila, H., & Wulandari, P. (2023). Evaluasi program SISKEUDES dalam tata kelola keuangan desa. *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa*, 7(1), 65–79. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1489>
- Rachmawati, F., & Santoso, R. (2024). Analisis kinerja aparatur desa dalam penerapan SISKEUDES. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pembangunan*, 14(1), 23–37.
- Rahmadani, T., & Fikri, A. (2019). Penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa di Kabupaten Agam. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 7(3), 98–110.
- Rivan, M., & Maksum, A. (2019). Analisis efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Publik*, 6(3), 45–58. <https://doi.org/10.31219/jipkp.v6i3.2019>
- Wulandari, R., & Hidayah, N. (2021). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi keuangan desa di era digital. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 120–134.
- Hulme, D., & Turner, M. (1997). *Governance, administration and development: Making the state work*. Macmillan Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-25675-4>
- Supriyono, B. (2018). *Efektivitas, koherensi, dan good governance (ECG) dalam pemerintahan daerah*. Gava Media.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Panduan implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.4*. BPKP.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Tren kasus korupsi dana desa tahun 2024*. ICW.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.